

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.tempo.co
Media Cetak	

DPRD Ingatkan Pemerintah DKI Cermat Mendata Penerima Bansos

Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta pemerintah DKI lebih cermat mendata penerima bantuan sosial atau bansos kepada warga membutuhkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan begitu, pemerintah daerah bisa meminimalisasi kesalahan.

"Kita harus berusaha menekan laju margin of error itu sedikit mungkin sambil terus memperbaiki," kata Iman saat dihubungi, Kamis, 30 April 2020.

Menurut dia, hanya itu yang bisa dilakukan pemerintah DKI. Sebab, Iman meyakini, pemerintah DKI tak akan bisa 100 persen menyempurnakan data penerima bansos. Itu artinya, masih ada kemungkinan bansos disalurkan tidak tepat sasaran.

Alasannya, pemerintah DKI tak punya banyak waktu untuk memverifikasi data. Iman mempertanyakan sampai kapan pemerintah DKI menahan penyaluran bansos tahap dua jika menunggu perbaikan data rampung.

"Dari dulu sejak Pemprov lahir sampai sekarang yang namanya pendataan kita tidak pernah siap 100 persen, apalagi cuma diminta waktu 1–2 minggu," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Karena itu, dia meminta mulai dari RT dan RW hingga dinas benar–benar cermat mendata. Pemerintah DKI, tutur Iman, juga harus memberikan tanggung jawab kepada RT dan RW.

"Supaya dia juga bisa memberikan pendataan yang betul–betul berhak menerima," ujarnya.

Sebelumnya, pendistribusian bansos oleh pemerintah DKI sejak 9 April karut–marut. Penerima bansos tidak tepat sasaran. Orang kaya hingga anggota DPRD DKI masuk dalam daftar penerima bantuan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, penerima bansos adalah warga miskin dan rentan miskin.

Alhasil, pemerintah DKI menunda penyaluran bansos tahap dua. Penundaan itu sampai perbaikan data selesai demi menghindari kesalahan penyaluran seperti fase pertama. Bahkan pemerintah kota Jakarta Timur telah menarik kembali 874 paket bansos karena dianggap salah sasaran.